

# FNKSDA SEBAGAI WUJUD GERAKAN ISLAM NUSANTARA “HIJAU’

Listiana Asworo  
Universitas Muhammadiyah Malang  
listianaasworo@umm.ac.id

Nuruddin Al Akbar  
Universitas Gadjah Mada  
nuruddin.alakbar@gmail.com

---

**Abstract.** This study seeks to get out of mainstream thinking in environmental studies that are based on Eurocentric logic. Mainstream studies emphasize the "secular" pattern of "universal" environmental ideologies. There are few works that try to explore the idea of saving the environment based on local wisdom and local religious traditions. This study would like to provide another perspective that the environmental struggle can be upheld by based on religious ideas that grow in Indonesia which are sharpened by the tradition of environmental movements that arise in the Western context (specifically the green Marxism movement). The process of dialogue between the East and West cultures was evident from the presence of the FNKSDA (Nahdliyin Front for the Sovereignty of Natural Resources) which was initiated by the Nahdliyin youth. FNKSDA can be interpreted as a concrete form of "dialogue" in the traditions of Nahdliyin and Marxism, especially regarding the commitment to preserve the environment from the threat of capitalism. This movement itself has a praxis tendency, meaning that it not only cares about the design of environmental ideologies but also seeks to carry out environmental advocacy processes in various vulnerable areas. The model of this dialogue, for example, can be found in a variety of FNKSDA activities that do not use old typical of Nahdliyin such as "Ngaji", "Fikih" but also dialogue with Western terms such as capitalism, internal contradictions of Capitalism and Marxism.

**Key Words:** *FNKSDA, Environmental Theology, Green Marxism, Religious Environmental movement.*

**Abstrak:** Studi ini berupaya keluar dari corak berfikir mainstream dalam studi lingkungan yang berpijak pada logika Eurosentris. Studi mainstream dimana lebih menekankan pada ideologi lingkungan "universal" yang bercorak "sekuler". Sedikit karya yang mencoba lebih menggali ide penyelamatan lingkungan yang lebih berbasis pada kearifan lokal dan tradisi keagamaan lokal. Studi ini ingin memberikan prespektif lain bahwa perjuangan lingkungan bisa ditegakkan dengan berfondasi pada ide keagamaan yang tumbuh di indonesia yang dipertajam dengan tradisi gerakan lingkungan yang muncul dalam konteks Barat (secara spesifik gerakan Marxisme hijau). Proses dialog kultur Barat-Timur tersebut itulah yang nampak dengan hadirnya gerakan FNKSDA (Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam) yang diinisiasi oleh kalangan muda Nahdliyin. FNKSDA dapat dimaknai sebagai wujud konkrit "dialog" tradisi Nahdliyin dan Marxisme, terkhusus mengenai

komitmen menjaga kelestarian lingkungan dari ancaman kapitalisme. Gerakan ini sendiri punya tendensi praxis, artinya tidak hanya hirau terhadap rancang bangun ideologi lingkungan tetapi juga berupaya melakukan proses advokasi lingkungan di berbagai wilayah rentan. Corak dialog ini misalnya dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan FNKSDA yang tidak lupus menggunakan term khas kaum Nahdliyin seperti “Ngaji”, “Fikih” tetapi juga mendialogkannya dengan istilah Barat seperti term Kapitalisme, kontradiksi internal Kapitalisme, dan Marxisme.

**Kata Kunci:** *FNKSDA; Teologi Lingkungan; Marxisme Hijau; Gerakan Lingkungan Beragama.*

## Pendahuluan

Agama dan lingkungan seakan berada dalam dua regangan kutub. Diskusi tentang agama lebih banyak didominasi kajian-kajian teologis. Sementara, ranah lingkungan lebih bertendensi ideologis. Dua terminologi yang seakan tidak memiliki titik temu. Faktanya, agama dan lingkungan tidak selalu terlepas satu dengan yang lainnya. Mendiskusikan lingkungan misalnya sangat dimungkinkan untuk didekati dengan perspektif agama. Sementara, di dalam ajaran agama juga seringkali diajarkan bagaimana lingkungan harus diperlakukan semestinya.

Tulisan ini membawa spirit di atas, yakni ingin melampaui kajian mainstream tentang lingkungan dan agama. Jika selama ini, diskursus tentang lingkungan dan agama lebih didominasi oleh kajian teologi lingkungan, maka studi ingin melangkah lebih jauh yakni memahami bagaimana teologi lingkungan tersebut diaplikasikan dalam sebuah gerakan yang kongkrit. Dengan kata lain, studi ini ingin menjelaskan sebuah gerakan pro lingkungan yang dimotivasi oleh ideologi tertentu (baca: agama). Sehingga, gerakan pro lingkungan tersebut memiliki kekhasan.

Untuk menjelaskan hal tersebut, FNKSDA merupakan contoh yang tepat. FNKSDA merupakan representasi gerakan pro lingkungan berbasis agama yang bisa dikatakan keluar dari “pakemnya”. FNKSDA tidak hanya memformulasikan teologi lingkungan berbasis tradisi Islam di Nusantara (secara khusus tradisi kaum Nahdliyin), tetapi juga berupaya memadukan tradisi Islam Nahdliyin dengan ideologi marxisme. Fusi tradisi Islam Nusantara dan Marxisme inilah yang menjadi kekhasan ataupun keunikan dari FNKSDA.

Tulisan ini sekaligus untuk memberikan alternatif pembacaan yang telah muncul sebelumnya mengenai FNKSDA. Jika sejumlah akademisi FNKSDA sebelumnya cenderung lebih banyak mengulas dari “tampak permukaannya saja”, tulisan ini mencoba menawarkan pembacaan yang lebih mendalam atas pemikiran dan corak gerakan FNKSDA.

Penelitian tentang Pemikiran Islam/teologi tentang Lingkungan dalam kasus Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Alasannya karena tujuan penelitian ini ialah mengungkap apa karakteristik yang khas dari FNKSDA dibandingkan dengan teologi yang dilembangkan oleh pemikir/intelektual atau sebuah organisasi Islam lain walau tidak menampik kemungkinan adanya kesamaan diantara pemikiran mereka karena sama-sama merujuk pada tradisi Islam. Metode studi kasus sendiri memang diperuntukkan untuk penelitian yang fokus kajiannya merupakan kasus tunggal yang ingin dikupas secara menyeluruh atau komprehensif karena kaunikan yang ada padanya.<sup>1</sup>

Desain kualitatif membantu penelitian ini menjadi lebih mendalam dan terarah karena obyeknya jelas yakni kelompok/jaringan FNKSDA yang memiliki latar belakang kultural yang khas pula yakni “islam tradisional” jika mengacu pada dikotomi ala Deliar Noer.<sup>2</sup> Oleh karena itu, metode studi kasus tepat digunakan untuk mendapatkan jawaban penelitian yang ingin memahami Pemikiran Islam/teologi tentang Lingkungan yang khas ala kaum santri “tradisional” yang tergabung dalam FNKSDA.

Selain karena alasan diatas, metode studi kasus juga berkesesuaian dengan misi riset ini. *Pertama*, rumusan masalah menggunakan kata *tanyabagaimana*, yakni bagaimana FNKSDA memformulasikan ide teologi lingkungan berbasis Islam khas. *Kedua*, riset ini adalah riset kontemporer atau bersifat kekinian yang didasarkan pada fokus dan lokus penelitian yang sepsifik, yakni FNKSDA dan corak pemikirannya. *Ketiga*, dalam penelitian ini peneliti tidak memiliki peluang untuk

<sup>1</sup>Earl R Babbie, *The Practice of Social Research* (Belmont, CA. : Thomson Wadsworth, 2007) h. 298-300.

<sup>2</sup>Luthfi Assyaukanie, *Islam and the Secular State in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2009) h.5. Lihat pula: Rumadi, *Islamic Post-Traditionalism in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2015) h. 98.

mengontrol fenomena yang sedang diteliti sebagaimana diayangkan dalam logika penelitian kuantitatif.<sup>3</sup>Peneliti lebih berupaya untuk memahami (*verstehen*) terhadap fenomena yang tengah terjadi. Dalam hal ini fenomena yang dimaksud tidak langsung bisa ditangkap secara kasat mata tetapi melalui telah secara lebih mendalam pada berbagai publikasi maupun aksi yang dilakukan FNKSDA untuk mengungkap pemikirannya.

Dalam kasus FNKSDA penelitian ini tidak hanya memahami seperti apa (*what*) wujud teologi lingkungan yang diusung FNKSDA tetapi bagaimana (*how*) teologi lingkungan tersebut dikonstruksikan, yang juga mengimplikasikan telaah akan konteks. Konteks yang dimaksud yakni pertanyaan mengapa (*why*) teologi lingkungan seperti itu yang diartikulasikan oleh FNKSDA bukan dalam bentuk yang lain. Konteks inilah yang dapat dinyatakan sangat terkait dengan pemahaman akan fenomena yang terjadi secara komprehensif. Dimana permasalahan lingkungan semacam apa yang dihadapi atau konteks masyarakat seperti apa yang ada, termasuk tradisi apa yang mempengaruhi para aktivis FNKSDA dalam merancang ide tersebut merupakan bagian penting dari penelitian ini yang perlu untuk digali.

Perlu ditegaskan bahwa meskipun studi kasus lebih spesifik untuk menyoroti satu kasus yang memiliki keunikan tersendiri, tetapi metode studi kasus tetap mendedikasikan temuan di lapangan bagi pengembangan ilmu secara umum. Dalam konteks telaah teologi pro lingkungan FNKSDA, hasil temuan tidak hanya dimaksudkan untuk “berdiri sendiri” tetapi terkait erat dengan pengembangan pengetahuan mengenai eksistensi teologi lingkungan berbasis agama, khususnya yang berasal dari tradisi Islam.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data-data primer dan sekunder. Data-data primer meliputi *kata-*

*kata* dan *tindakan* informan (dalam hal ini para aktivis FNKSDA)<sup>4</sup>. Perlu dipahami bahwa dalam penelitian ini data primer didapatkan tidak lewat metode wawancara langsung tetapi melihat aneka wacana yang disampaikan oleh aktivis FNKSDA tersebut di berbagai media (khususnya media resmi milik mereka sendiri). Cara ini diambil mengingat FNKSDA memang sedari awal mencoba berinteraksi dengan masyarakat luas melalui media sosial. Sehingga justru dengan mengamati aneka wacana di media sosial mereka sendiri –dan juga mungkin juga dengan telaah kata-kata dan informan FNKSDA yang terekam media lain- maka justru akan didapatkan hasil yang akurat. Terkait dengan data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini terkait aneka sumber yang membahas tentang FNKSDA tetapi bukan dari tuturan dan tindakan para aktivis FNKSDA secara langsung. Data sekunder disini misalnya analisis tentang FNKSDA yang dilakukan akademisi, atau sesama gerakan lingkungan lain, termasuk juga respon masyarakat mengenai eksistensi FNKSDA tersebut.

### **FNKSDA sebagai sintesis antara *Green Marxism* dan Tradisi Pesantren**

Guna memahami bagaimana FNKSDA memformulasikan sebuah teologi pro lingkungan yang “khas” dan upaya mereka untuk menjadikan teologi tersebut sebagai basis gerakan mereka maka tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai sejarah berdirinya gerakan tersebut. Merujuk pada Lembar 'Kerja' Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FN-KSDA) eksistensi jaringan ini dapat dilacak hingga pertemuan yang terjadi di kantor LkiS (Lembaga Kajian Islam dan Transformasi Sosial) Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 2013. Ini dimotori dan juga dihadiri oleh person atau lembaga yang memiliki kedekatan dengan kultur NU

<sup>3</sup>Pawito, *Penelitian komunikasi kualitatif* (Yogyakarta: LKiS, 2007) h.53.; A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014) h.79.

<sup>4</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja. Rosdakarya, 2008) h. 157.

seperti jaringan Gus Durian, LkiS, Lakpesdam Jombang.<sup>5</sup>

Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan kalangan tersebut terhadap kondisi sosial politik yang terjadi di Indonesia khususnya terkait masalah pengelolaan sumber daya alam (SDA). Bagi kalangan tersebut saat ini telah terjadi salah kelola sumber daya alam di Indonesia yang berbuah pada penindasan pada warga –termasuk warga yang berlatar belakang Nahdliyin- maupun kerusakan lingkungan.<sup>6</sup> Di sisi lain kalangan yang notabene memiliki kedekatan dengan kultur Nahdliyin ini merasa organisasi NU sebagai representasi dari jamaah NU dianggap tidak mampu berbuat banyak dalam menghadapi pserosalan tersebut. Kalaupun ada langkah-langkah yang dilakukan oleh NU secara organisatoris, dalam diskusi tersebut dirasa tidak banyak mampu mengerem laju eksploitasi sumber daya alam yang bermasalah tersebut sehingga dari hari ke hari persoalan bukannya tambah mereda tetapi semakin runyam.<sup>7</sup>Terlebih lagi ternyata di sejumlah wilayah elit NU justru menjadi bagian dari “persekongkolan jahat” tersebut sehingga eksploitasi Sumber daya alam dapat berjalan dengan mulus.<sup>8</sup>

Pasca menemukan “kondisi obyektif” yang terjadi di lapangan, para peserta diskusi tersebut yang notabene sebagaiannya sudah lebih dahulu aktif melakukan advokasi terhadap persoalan sumber daya di berbagai wilayah sepakat untuk membuat sebuah wadah yang memungkinkan bagi berbagai kalangan yang hadir tersebut dapat berkomunikasi dan bekerjasama dengan lebih baik. Dari situlah akhirnya muncul sebuah opsi untuk mendirikan sebuah jaringan yang

dinamakan Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FN-KSDA).<sup>9</sup>

FNKSDA sendiri memiliki dua kerangka kerja strategis, yakni: *pertama*, terkait dengan aksi ke luar NU maka FNKSDA berupaya membangun aliansi dengan berbagai macam gerakan lain, termasuk gerakan pro lingkungan “sekuler” semacam WALHI atau gerakan yang tidak secara khusus mengusung isu lingkungan tetapi terlibat aktif dalam menyuarakan perlunya tata kelola sumber daya alam yang lebih baik seperti JATAM<sup>10</sup> dan Desantara<sup>11,12</sup>. Dapat dikatakan kerangka kerja ke luar NU ini sifatnya advokatif terhadap para “korban” yang terkena dampak eksploitasi SDA sekaligus mencegah perusakan lingkungan yang semakin meluas. Kedua, gerakan ke dalam NU. Gerakan ke dalam NU ini sifatnya berupaya “penyadaran” sehingga NU secara organisatoris ataupun kalangan masyarakat yang mengaku berkultur Nahdliyin “terbuka matanya” dan menjadi lebih aktif dalam melawan eksploitasi SDA yang bermasalah tersebut.<sup>13</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik satu kesimpulan penting, terkhusus dalam

<sup>9</sup>Tim FNKSDA, *Lembar 'Kerja' Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FN-KSDA)*, h.5

<sup>10</sup>Merujuk pada website resmi JATAM disebutkan bahwa jaringan ini memiliki minat advokasi yang luas mencakup masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas. JATAM. “Tentang Kami”. <https://www.jatam.org/tentang-kami/> diakses tanggal 5 April 2019.

<sup>11</sup>Sebagaimana JATAM, Desantara juga tidak secara spesifik mengusung isu lingkungan tetapi isu penguatan komunitas (khususnya dari kelompok minoritas). Akan tetapi dalam perkembangannya Desantara tidak hanya mengadvokasi penguatan komunitas dalam kaitannya dengan isu identitas belaka (multikulturalisme) tetapi juga komunitas dengan “habitatnya” (isu lingkungan). Desantara. “Tentang Kami”. <http://www.desantara.or.id/tentang-kami/> diakses tanggal 5 April 2019.

<sup>12</sup>Tim FNKSDA, *Lembar 'Kerja' Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FN-KSDA)*, h. 5.

<sup>13</sup>Tim FNKSDA, *Lembar 'Kerja' Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FN-KSDA)*, h. 5.

<sup>5</sup>Tim FNKSDA, *Lembar 'Kerja' Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FN-KSDA)*, h. 4

<sup>6</sup>Tim FNKSDA, *Lembar 'Kerja' Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FN-KSDA)*, h.2-3

<sup>7</sup>Tim FNKSDA, *Lembar 'Kerja' Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FN-KSDA)*, h.3

<sup>8</sup>Tim FNKSDA, *Lembar 'Kerja' Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FN-KSDA)*, h.4

konteks gerakan ke dalam NU. Dapat dikatakan “revolusi mental” menjadi kunci untuk sebuah transformasi sosial yang besar di tubuh NU. Sebagaimana dinyatakan dalam lembar 'Kerja' Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FN-KSDA), dibutuhkan gelombang kedua isu kepemimpinan di tubuh NU pasca gelombang pertama transformasi di tubuh NU yang dinilai “cukup sukses”. Gelombang pertama sendiri merujuk pada ide pluralisme yang disuarakan Gus Dur yang notabene telah melahirkan para pegiat (pemimpin) dari tubuh NU baik di tingkat lokal maupun nasional yang berwawasan pluralisme.<sup>14</sup> Bagi FNKSDA diperlukan gelombang kedua yang berpusat pada isu tata kelola sumber daya alam (SDA).<sup>15</sup> Terlihat jelas apa yang sudah dilakukan Gus dur melalui “revolusi mentalnya” coba direproduksi ulang untuk menggolkan isu SDA yang selama ini dianggap belum menjadi perhatian penting di kalangan kaum Nahdliyin.

Sebuah prasyarat penting yang diperlukan dalam upaya “revolusi mental” tersebut tentunya adalah faham, ideologi, atau teologi baru yang memungkinkan terjadinya perubahan di level pemikiran seseorang. Gelombang perla ala Gus Dur sendiri dicirikan oleh ide atau teologi khas yakni pluralisme. Sementara dalam gelombang kedua yang dibayangkan ingin diciptakan FNKSDA masih berupa rumusan generik yakni isu tetakelola SDA. Tentunya tidak mungkin membayangkan akan adanya transformasi pengelolaan SDA jika tidak ditopang sebuah ide atau teologi tertentu yang berfungsi sebagai pedoman bagi arah transformasi itu sendiri termasuk strategi semacam apa yang sekiranya dapat ditempuh untuk memastikan proses transformasi tersebut berhasil. Patut juga untuk dipahami bahwa ketika ide, faham, ideologi, atau teologi ini ingin menjadi “arus utama” pemikiran kalangan Nahdliyin maka tentunya ide ini harus

mampu “berdialog” dengan kultur Nahdliyin itu sendiri. Jika spirit “dialog” ini tidak mampu untuk dilakukan maka akan sangat sulit bagi kalangan Nahdliyin untuk menerimanya sebagai suatu paham yang layak untuk mereka perjuangkan. Ambil contoh ajaran Ibnu Taimiyyah, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang masuk ke Indonesia di masa lalu (pada abad ke 19) segera ditanggapi secara negatif oleh kalangan Nahdliyin (saat itu belum terbentuk NU secara organisatoris, hanya secara kultural saja dikenal dengan istilah Muslim tradisional<sup>16</sup>). Ibaratnya jangankan diterima, kitab-kitab yang memuat ajaran Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha saja dilarang dibaca dan para pengikut paham tersebut dinyatakan sebagai ahlu bidah yang sesat.<sup>17</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi FNKSDA untuk merumuskan sebuah teologi pro lingkungan yang “khas”, dimana tidak hanya berbicara tentang perlindungan terhadap alam tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak warga yang berbanting terhadap kelestarian alam tersebut (nuansa antroposentrik yang kuat tidak ke arah mazhab *deep ecology* yang cenderung non antroposentrik bahkan terkadang anti antroposentrik)<sup>18</sup>, berbicara tentang isu lingkungan di satu sisi tetapi disisi yang lain juga harus “menghormati” tradisi Nahdliyin yang khas pula. Dapat dikatakan “pilihan” dari kelompok ini ialah dengan cara memadukan atau lebih tepatnya “memfusikan” antara ide marxisme (hijau) dan juga tradisi pesantren.

<sup>16</sup>Greg Barton, *Biografi Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 2002) h.66-69; Abd A'la, *Pembaruan Pesantren*. (Yogyakarta:LKiS, 2006) h. 167.

<sup>17</sup>Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007) h.101.

<sup>18</sup>Michael E. Zimmerman, *Contesting Earth's Future: Radical Ecology and Postmodernity* (London: University of California Press, 1994) h. 35.

<sup>14</sup>Tim FNKSDA, *Lembar 'Kerja' Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FN-KSDA)*, h. 6.

<sup>15</sup>Tim FNKSDA, *Lembar 'Kerja' Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FN-KSDA)*, h. 6.

## FNKSDA dan Basis Teologinya

Jika merujuk pada Lembar 'Kerja' Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FN-KSDA) tidak ditemukan secara eksipit bahwa basis teologi lingkungan yang mereka usung adalah fusi antara Marxisme (hijau) dengan tradisi pesantren. Begitu pula jika merujuk penelitian terdahulu misalnya yang ditulis oleh Fardan Mahmudatul Imamah atau Abdul Kodir & In'amul Mushoffa. Imamah misalnya –secara implisit- menggolongkan FNKSDA sebagai bagian dari gerakan eco-sufisme<sup>19</sup>, yang notabene bisa dilacak pada gagasan tokoh sufistik kontemporer semacam Hosein Nasr.<sup>20</sup> Analisis ini cenderung “prematur” karena jika mencermati tulisan para aktivis FNKSDA sendiri justru menentang Sufisme dalam arti yang “ortodox”, termasuk ide sufisme yang digaungkan oleh Hosein Nasr. Salah satu aktivis FNKSDA Roy Murtadho<sup>21</sup> misalnya mencibir gagasan sufisme semacam ini sebagai gagasan absurd yang: *“berharap kaum borjuis berkenan untuk menyerahkan alat produksinya dan beralih menggilai Allah dengan hidup sederhana ala petapa”*<sup>22</sup> atau *“mengharapkan tatanan sosial berubah dengan sendirinya setelah para kaum borjuis bertaubat dengan tetap mengakumulasi kapital dengan menghisap kelas pekerja asal tidak melampaui batas”*<sup>23</sup>.

<sup>19</sup>Fardan Mahmudatul Imamah, Menghadapi Kapitalisme: Pendekatan Eco-Sufism dalam Gerakan Environmentalisme di Indonesia. *Jurnal Kontemplasi* Vol. 05 No. 01, 2017, h. 127-128.

<sup>20</sup>Fardan Mahmudatul Imamah, Menghadapi Kapitalisme: Pendekatan Eco-Sufism dalam Gerakan Environmentalisme di Indonesia. *Jurnal Kontemplasi* Vol. 05 No. 01, 2017, h.117-118.

<sup>21</sup>Murtadho adalah Koordinator Wilayah Jawa Timur FNKSDA. Murtadho juga merupakan kontributor sejumlah website beraliran kiri seperti Indoprogres dan Islambergerak

<sup>22</sup>Roy Murtadho, “Tasawuf dan Pembebasan”, <https://indoprogress.com/2018/02/tasawuf-dan-pembebasan/> diakses tanggal 7 April 2019.

<sup>23</sup>Roy Murtadho, “Tasawuf dan Pembebasan”, <https://indoprogress.com/2018/02/tasawuf-dan-pembebasan/> diakses tanggal 7 April 2019.

Kalaupun memang FNKSDA bisa digolongkan sebagai kalangan yang mempropagandakan teologi eco-sufisme maka sebagaimana yang dinyatakan Murtadho sendiri bahwa corak sufisme mereka adalah: *“spiritualisme materialisan revolusioner, yang tak sekadar mengajak kaum protelar bersabar dalam kemiskinan dan menjadi objek penderita, tapi menjadikannya sebagai subjek sejarah, melalui perjuangan kolektif manusia tertindas melawan penghisapan dan perusakan alam”*. Sufisme ala Murtadho tersebut dengan jelas menurutnya mesti berbasis pada *“konsepsi materialis Marx terhadap alam, yang pada hakikatnya juga bernilai spiritual”*.<sup>24</sup> Sangat jelas bahwa ide tentang fusi Islam dan Marxisme menjadi krusial disini, dimana Marxisme mestilah difusikan dengan tradisi Islam, termasuk ajaran sufisme yang juga notabene menjadi ciri khas kalangan Nahdliyin.<sup>25</sup>

Senada dengan Imamah, Abdul Kodir & In'amul Mushoffa memberikan kesimpulan yang terkesan “prematur” dengan menyatakan bahwa basis teologi lingkungan ala FNKSDA adlaah Quran, Hadits, ijma, Qiyas, serta kultur Ahlus sunnah Wah Jamaah (Aswaja)–dalam arti Aswaja ala NU/disebut juga Aswaja An Nahdliyah-<sup>26,27</sup> Apa yang dinyatakan Abdul

<sup>24</sup>Roy Murtadho, “Tasawuf dan Pembebasan”, <https://indoprogress.com/2018/02/tasawuf-dan-pembebasan/> diakses tanggal 7 April 2019.

<sup>25</sup>Moeflich Hasbullah, *Islam & Transformasi Masyarakat Nusantara* (Depok: Kencana, 2017) h.215-216.

<sup>26</sup>Paling tidak ada sejumlah ciri khas Aswaja An Nahdliyah ini yakni: (a). Di bidang syariah/fiqh, mengikuti salah satu dari madzhab empat, yaitu madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, madzhab Syafii dan madzhab Hanbali. (b). Di bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan madzhab Imam Abu Manshur al-Maturidi. (c). Di bidang akhlaq/tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Baghdadi dan madzhab Imam Abu Hamid al-Ghazali. NU Online. “Inilah Penjelasan Mengenai Aswaja Perspektif NU”. <http://www.nu.or.id/post/read/61776/inilah-penjelasan-mengenai-aswaja-perspektif-nu> diakses tanggal 7 April 2019

<sup>27</sup>Abdul Kodir & In'amul Mushoffa. *Islam, Agrarian Struggle, and Natural Resources:*

Kodir & In’amul Mushoffa tidak sepenuhnya keliru, tetapi dengan melupakan Marxisme adalah sebuah “lubang” besar dalam memahami FNKSDA, sebab ide Marxisme tersebut berfungsi sebagai kerangka/paradigma dalam menafsir Quran, Hadits, maupun dalam upaya mereinterpretasikan tradisi Aswaja tersebut agar bercorak revolusioner. Bukti dari penempatan Marxisme sebagai paradigma tafsir ini salah satunya tergambar dari pernyataan Murtadho yang menyatakan bahwa sufisme yang harus dikembangkan bukanlah sufi “ortodox” tetapi sufisme yang berpijak pada konsepsi materialis Marx. Pernyataan Murtadho tersebut secara gamblang mendudukkan Marxisme sebagai kerangka/paradigma untuk mereinterpretasikan tradisi sufisme. Begitu pula dengan tafsir FNKSDA atas Quran, Hadits ataupun tradisi Aswaja an Nahdliyah dapat dikatakan menggunakan kerangka Marxisme sebagai pedoman untuk menafsirkan teks kitab suci tersebut ataupun merekonstruksi tradisi NU ke arah revolusioner.

Selain pernyataan Murtadho ada sejumlah bukti lain yang mengindikasikan vitalnya ide Marxisme bagi formulasi teologi pro lingkungan ala FNKSDA. Salah satu diantaranya dapat dilihat pada gambar 1.1. Gambar 1.1. adalah sebuah poster kajian yang dikeluarkan oleh FNKSDA. Dalam poster tersebut terdapat gambar Karl Marx dan judul kajian yang unik yakni Fiqh dan Marxisme: Menuju Fiqh Pembebasan? Dari judul tersebut sudah dapat diambil sebuah petunjuk penting tentang fusi Islam dan Marxisme ala FNKSDA. Fiqh sendiri salah satu cabang ilmu agama penting dalam islam yang membahas mengenai hukum (mulai dari ibadah, muamalat, hingga jinayat). Kalangan Nahdliyin sendiri acapkali dikenal dengan posisi fiqhnya yang khas yakni mengikuti salah satu imam madzah empat, terkhusus imam Syafii. Ternyata bagi kalangan FNKSDA bangunan fiqh sendiri *an sich* yang sudah menjadi

“tradisi” beragama ala Nahdliyin tidak “cukup” revolusioner dan bernuansa pembebasan (baik bagi manusia maupun bagi kelestarian lingkungan). Hanya dengan pertautan antara Marxisme dan fiqh sajalah bagi FNKSDA maka sebuah bangunan fiqh baru yang bernuansa revolusioner dapat diwujudkan. Dengan kata lain Marxisme menjadi penting untuk mentransformasikan bangunan fiqh itu sendiri, sehingga tidak salah jika dikatakan diperlukan “injeksi” paradigma Marxisme dalam bangunan fiqh tersebut agar menjadi bernuansa “pembebasan”. Disini nampak jelas teologi FNKSDA yang berpijak pada ide fusi Islam dan Marxisme.

**Gambar 1.1**  
**Poster Kajian FNKSDA yang Secara Eksplisit Mengusung Wacana Fusi Islam dan Marxisme**



Sumber:

[https://www.picbon.com/media/1689328823\\_021545323\\_6662814741](https://www.picbon.com/media/1689328823_021545323_6662814741)

Nuansa fusi semakin terasa jika mencermati keterangan tambahan dari poster tersebut yakni: *“Apa yang akan lahir ketika kitab “Fathul Mu’in” berjumpa dengan buku “Das Kapital”? Atau ketika kitab “Al-Muwafaqat” Imam as-Syathibi bertemu “Grundrisse”? Ikuti diskusinya bersama kelompok kajian kawan-kawan mahasantri Ma’had Aly Sukorejo, insya Allah besok. Mempertajam nalar keberpihakan pada kaum agamawan. Mengkontekstualkan fiqh di era kapitalisme yang sarat krisis dan*

The Exertion of Front Nahdliyin for Sovereignty of Natural Resources Struggle Towards Socio-Ecological Crisis in Indonesia. Dalam *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* Vol. 25 No.1, 2017, h. 65.

*penindasan*”.<sup>28</sup> Sebagaimana ditegaskan sebelumnya kaum Nahdliyin dikenal secara luas sebagai kalangan yang mempretekan fiqh Islam merujuk pada empat imam mazhab, khususnya imam Syafii. Kitab Fathul Mu’in sendiri adalah kitab yang terkenal dalam mazhab Syafii. Dikatakan oleh FNKSDA dengan bahasa retorik bagaimana bagaimana jika kitab tersebut “difusikan” dengan das kapital? Jawabannya diberikan oleh FNKSDA sendiri walau dengan bahasa yang terkesan “malu-malu” yakni fiqh pembebasan. Disini ide “Mengkontekstualkan fiqh di era kapitalisme yang sarat krisis dan penindasan” tidak lain adalah ide fusi itu sendiri dimana dibayangkan akan menghasilkan bangunan fiqh baru yang bernafaskan ide revolusioner ala Marxisme.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin memahami teologi pro lingkungan ala FNKSDA tanpa memahami Marxisme, karena ide Marxis itulah yang berfungsi menjadi paradigma untuk membaca ulang, mereinterpretasi, atau mengkontekstualisasikan cara kalangan Nahdliyin dalam bergamana selama ini baik dalam hal menafsir Quran dan Hadits ataupun dalam dibang lainnya. Tentu menjadi pertanyaan sendiri ajaran Marxisme seperti apa yang diadopsi FNKSDA mengingat meskipun Marxisme lekat dengan Karl Marx tetapi hingga era kontemporer saat ini ada berbagai varian interpretasi Marxisme mulai dari yang digolongkan “ortodox” hingga kalangan yang sering disebut “postmarxis”.

Setidaknya ada dua kata kunci penting dalam hal ini yakni ide *green*

*marxism* dan kapitalisme ekstraktif. *Pertama*, terkait ide *green Marxism*. Salah satu pionir dari ide *green Marxism* dapat dilacak pada tokoh ekonomi bernama James O’ Connor.<sup>29</sup> Connor sendiri merupakan editor dari jurnal Marxis ternama yakni *Capitalism, Nature, and Socialism* yang memang berkuat untuk mendalami keterkaitan antara Marxisme dan persoalan lingkungan.<sup>30</sup> Salah satu sumbangan besar Connor bagi eksistensi ide *green Marxism* ialah apa yang disebut sebagai hukum kedua kontradiksi Kapitalisme. Sebuah *term* yang coba dipopulerkannya lewat penyelenggaraan simposium reguler yang berjudul “*The Second Contradiction of Capitalism – the absolute law of environmental degradation under capitalism*”.<sup>31</sup>

John Bellamy Foster, seorang intelektual Marxis yang juga menjadi tokoh penting di balik pengembangan ide O’ Connor menjelaskan mengenai hukum kedua kontradiksi tersebut secara menarik dengan analoginya mengenai sosok “ayah” dan sosok “ibu”. Sosok “ayah” disini melambangkan buruh sedangkan sosok “ibu” melambangkan alam.<sup>32</sup> Foster menyatakan bahwa menurut Marx, kapitalisme melakukan penzaliman terhadap dua sosok tersebut, dimana terhadap sang “ayah” dieksploitasi tenaganya habis-habisan sedangkan

<sup>29</sup>Michael J. Lynch, “Ecological Marxism”, <http://greencriminology.org/glossary/ecological-marxism/> diakses tanggal 7 April 2019.

<sup>30</sup>Douglas Torgerson, *The Promise of Green Politics: Environmentalism and the Public Sphere* (Durham: Duke University Press, 1999) h. 42.

<sup>31</sup>Peter Hay, *Main Currents in Western Environmental Thought* (Sydney: UNSW Press, 2002), h. 276.

<sup>32</sup>John Bellamy Foster, The Absolute General Law of Environmental Degradation Under Capitalism. *Journal of Capitalism, Nature, and Socialism*, Vol. 3, No.3, 1992, h. 79.

<sup>28</sup>[https://www.picbon.com/media/1689328823021545323\\_6662814741](https://www.picbon.com/media/1689328823021545323_6662814741) diakses tanggal 7 April 2019.

terhadap sang “ibu”, kapitalisme merampoknya secara besar-besaran.<sup>33</sup>

Dengan kata lain logika kapitalisme berbuah pada penderitaan manusia dan kerusakan alam. Logika “kezaliman” kapitalisme terhadap alam inilah yang menjadi tonggak bagi Foster untuk mengemukakan hukum kedua kontradiksi kapitalisme yakni akumulasi kapital di satu sisi dan akumulasi kerusakan lingkungan di sisi lain.<sup>34</sup> Logikanya sederhana, yakni perampokan besar-besaran alam akan terus meningkat guna memenuhi hasrat produksi ala kapitalisme yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya (bagi individu kapitalis bukan bagi masyarakat umum dan alam). Peningkatan perampokan ini berujung pada semakin rusaknya alam dan akhirnya menimbulkan berbagai bencana ekologis yang sejatinya menjadi “lonceng kematian” bagi sistem kapitalisme itu sendiri karena gagal menjaga sustainabilitas produksinya.<sup>35</sup> Lebih jauh dengan munculnya kerusakan alam tersebut bagi Connor justru akan semakin mempercepat “keruntuhan” kapitalisme itu sendiri, terbukti dengan bermunculannya berbagai gerakan lingkungan yang menyerukan perlawanan terhadap sistem kapitalisme.<sup>36</sup> Dalam kaitannya dengan *green marxism*, Connor sendiri

memandang bahwa hanya dengan penghancuran sistem kapitalisme itulah survivalitas manusia dan alam dapat dipastikan.<sup>37</sup>

*Kedua*, ide tentang kapitalisme ekstraktif. Kapitalisme ekstraktif sendiri sejatinya terkait erat dengan hukum kontradiksi kapitalisme kedua yang terkait dengan eksploitasi alam secara besar-besaran. Satu hal yang sekiranya “luput” dari analisis Foster ialah eksploitasi alam lebih berkaitan dengan penzaliman pada sosok “ibu” (alam) dan bukan “bapak” (manusia). Memang manusia juga akan terzalimi tetapi sebagai efek dari hasil olah industri tersebut yang berbuah pada berbagai kerusakan alam seperti munculnya hujan asam, *global warming*, pencemaran air yang pada akhirnya mengancam kehidupan manusia. Tetapi perlu diingat pula sejak awal dengan adanya eksploitasi alam tersebut -yang digunakan untuk sebagai bahan baku ataupun sumber energi bagi industri- juga berimplikasi negatif pada manusia yang berada di sekitar area industri ekstraktif tersebut. Dapat dikatakan seringkali industri ekstraktif hadir pada wilayah yang sebelumnya menjadi lahan warga untuk bekerja (misal areal pertanian) atau tempat tinggal warga. Akan tetapi demi “nafsu” kapitalisme, mereka harus disingkirkan demi pemenuhan kebutuhan sistem produksi kapitalisme.<sup>38</sup>

Dapat dikatakan warga yang terdampak kapitalisme jenis ini – umumnya di dunia ketiga- mengalami nasib yang lebih buruk dari kapitalisme

<sup>33</sup>John Bellamy Foster, *The Absolute General Law of Environmental Degradation Under Capitalism. Journal of Capitalism, Nature, and Socialism*, Vol. 3, No.3, 1992, h. 79.

<sup>34</sup>John Bellamy Foster, *The Absolute General Law of Environmental Degradation Under Capitalism. Journal of Capitalism, Nature, and Socialism*, Vol. 3, No.3, 1992, h. 78.

<sup>35</sup>John Bellamy Foster, *The Absolute General Law of Environmental Degradation Under Capitalism. Journal of Capitalism, Nature, and Socialism*, Vol. 3, No.3, 1992, h. 78-79.

<sup>36</sup>Douglas Torgerson, *The Promise of Green Politics: Environmentalism and the Public Sphere* (Durham: Duke University Press, 1999), h. 42.

<sup>37</sup>Douglas Torgerson, *The Promise of Green Politics: Environmentalism and the Public Sphere* (Durham: Duke University Press, 1999), h. 42-43.

<sup>38</sup>James Petras & Henry Veltmeyer, *Extractive Imperialism in the Americas: Capitalism's New Frontier*. (Leiden: Brill, 2014, h.59-60.

industri (sosok sang “bapak”).<sup>39</sup>Dalam logika kapitalisme industri, tenaga manusia memang “diperas” habis-habisan tetapi setidaknya mereka memiliki ruang untuk bekerja dan menikmati hasil –walaupun sangat tidak memadai-.Tetapi dalam kapitalisme ekstraktif, karena yang dibutuhkan adalah sumber daya bukan manusia maka penggunaan teknologi canggih menjadi pilihan agar sumber daya yang didapatkan semakin banyak.<sup>40</sup>Disini bukan lagi industri padat karya yang dipakai tetapi “padat mesin”.Sehingga warga yang kehilangan mata pencaharian lama atau tempat tinggalnya relatif lebih sukar untuk bertahan hidup karena ruang yang disediakan kapitalisme bagi mereka sangat kecil –jikalau ada-.Belum lagi dengan kerusakan lingkungan yang timbul dengan eksistensi industri ekstraktif tersebut yang secara langsung dirasakan oleh warga yang ada di sekitar lokasi industri.

Ide *green marxism* dan kapitalisme ekstraktif itulah yang diserap oleh FNKSDA dan “dikristalkan” menjadi paradigma perjuangan mereka. Sehingga tidak heran jika teologi FNKSDA bercorak sangat revolusioner sebagaimana tergambar dalam reinterpretasi resolusi Jihad Hasyim Asyari (yang disebut resolusi Jihad jilid II) dengan misi utama menumbangkan sistem kapitalisme, khususnya dalam wujudnya sebagai kapitalisme

ekstraktif.<sup>41</sup>Hal ini wajar mengingat kapitalisme ekstraktif itulah yang notabene menyasar langsung kalangan petani –yang juga merupakan warga Nahdliyin-.<sup>42</sup>

Sebuah pertanyaan besar mungkin muncul jika Marxisme merupakan fondasi penting bahkan krusial dalam teologi pro lingkungan ala FNKSDA lalu dimana posisi tradisi pesantren dalam bangunan teologi tersebut?Dapat dikatakan tradisi pesantren berposisi sebagai bahasa yang dipinjam untuk menyampaikan ide revolusioner Marxisme tersebut. Ibaratnya jika Marxisme adalah sebuah buku berbahasa Russia sedangkan sasaran pembacanya adalah masyarakat Indonesia yang mayoritas tidak bisa berbahasa Russia maka dibutuhkan proses translasi ke dalam bahasa Indonesia untuk memastikan ide dalam buku tersebut tersampaikan dan mudah untuk dicerna oleh masyarakat.

Analogi semacam ini tidaklah mengada-ada jika mencermati keinginan FNKSDA untuk meniru langkah Gus Dur yang mampu melakukan transformasi gelombang pertama dengan menyebarkan ide pluralisme dalam tubuh NU.Merujuk pada telaah sejumlah akademisi misalnya, nampak bahwa ide pluralisme dimasukkan ke dalam tubuh NU selain dengan mengandalkan ketokohan Gus Dur sebagai tokoh besar dan memiliki posisi strategis di tubuh NU tetapi juga dengan kepewayaan Gus

---

<sup>39</sup>Henry Veltmeyer, Investment, Governance, and Resistance in the New Extractive Economies of Latin America. Dalam Kalowatie Deonandan & Michael L. Dougherty (ed). *Mining in Latin America: Critical Approaches to the New Extraction* (Abingdon: Routledge, 2016), h. 34.

<sup>40</sup>Henry Veltmeyer, Investment, Governance, and Resistance in the New Extractive Economies of Latin America. Dalam Kalowatie Deonandan & Michael L. Dougherty (ed). *Mining in Latin America: Critical Approaches to the New Extraction* (Abingdon: Routledge, 2016), h. 34.

---

<sup>41</sup>NU Online. “Front Nahdliyin Cetuskan Resolusi Jihad II”. <http://www.nu.or.id/post/read/48653/front-nahdliyin-cetuskan-resolusi-jihad-ii> diakses tanggal 5 April 2019.

<sup>42</sup>Abdul Kodir & In’amul Mushoffa. Islam, Agrarian Struggle, and Natural Resources: The Exertion of Front Nahdliyin for Sovereignty of Natural Resources Struggle Towards Socio-Ecological Crisis in Indonesia. *Journal of Social and Islamic Culture* Vol. 25 No.1, 2017, h.62.

Dur menggunakan bahasa agama. Dikatakan Gus Dur selalu mengutip tiga ayat yang berbeda dari Quran yang ditafsirkan oleh Gus Dur dengan semangat pluralisme.<sup>43</sup> Dengan “tameng” bahasa agama itulah yang notabene menjadikan ide pluralisme yang “asing” tersebut dapat diterima oleh masyarakat NU yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat.

Pertanyaan lain yang mungkin muncul jika Marxisme ditempatkan sebagai paradigma apakah maknanya bahwa sejatinya teologi FNKSDA tidak berbeda dengan ideologi *green marxism* pada umumnya dimana letak perbedaannya hanya pada penggunaan bahasa pesantren bukannya bahasa ala kampus? Jawabannya tentu saja tidak karena fusi menyiratkan adanya sebuah “sintesis” sehingga selain radikalisme ke-Aswajaan, dapat dikatakan terjadi pula “pembumian” Marxisme. “pembumian” yang dimaksud karena Marxisme menggunakan bahasa pesantren, bahasa agama, dan bahasa tradisi Nahdliyin maka akan ada berbagai reinterpretasi baik dalam wujud bangunan teologi *green marxism* maupun dalam upaya advokasinya lewat gerakan sosial. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena bahasa pesantren memiliki konsep-konsep yang khas yang tidak ada dalam literatur Marxisme. Ketika Marxisme coba “dibumikan” dengan bahasa pesantren maka suka atau tidak harus ada penyesuaian dalam ide Marxisme itu sendiri agar dapat diterjemahkan dengan baik dan nantinya dipahami oleh masyarakat Nahdliyin.

Ambil contoh dalam formulasi teologi pro lingkungan ala FNKSDA isu politik identitas menjadi penting dibandingkan dengan isu politik kelas

misalnya. Hal ini misalnya tercermin dari lembar kerja FNKSDA sebagai berikut: “*Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan di bidang ekonomi' untuk' “mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat, sudah sepatutnya memiliki sikap terhadap persoalan ini. Terlebih-lebih, dalam banyak kasus konflik SDA di Indonesia, warga NU seringkali menjadi korban langsung. Misalnya, kasus Lumpur Lapindo di Porong...”*<sup>44</sup> Dinisi ke-NU-an menjadi penting untuk membangkitkan solidaritas warga NU menentang kapitalisme, bukan semata dengan mengusung wacana pembelaan terhadap petani atau warga termarginalkan *an sich*. Berbeda dengan logika politik kelas ala Marxisme klasik misalnya yang cenderung tidak suka dengan pembilahan berdasar identitas tetapi berdasar kepemilikan kapital (buruh/proletar dan kapitalis misalnya). Akan tetapi karena ide Marxisme ini karena sedang berupaya untuk “diterjemahkan” dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, yang memandang agama menjadi suatu hal yang penting mereka maka dengan bahasa semacam ini diharapkan akan lebih mudah diterima kalangan Nahdliyin. Berbeda jika menggunakan istilah rakyat, kaum tani, kaum proletar yang sangat mungkin dirasa “asing” atau “kurang layak untuk diperjuangkan” dalam pandangan kalangan Nahdliyin secara umum.

Selain dalam formulasi teologi yang harus mengadopsi politik identitas, “pembumian” Marxisme juga berimplikasi pada pola advokasi dan penyadaran yang coba dilakukan

<sup>43</sup>Ahmad Nurkholis, *Merajut Damai dalam Kebinekaan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017) h. 204

<sup>44</sup>Tim FNKSDA. Lembar 'Kerja' Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FN-KSDA), h.2-3 (penekanan ditambahkan)

FNKSDA. Misal dalam proses advokasi menolak pabrik semen di kendeng misalnya, dalam ide marxisme aksi revolusioner tentu menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar. Akan tetapi karena FNKSDA mengusung teologi lingkungan berbasis Marxisme yang sudah difusikan dengan tradisi pesantren maka spirit revolusioner ini perlu “dimoderasi” sedemikian rupa khususnya ketika berhadapan dengan para kyai yang berseberangan dengan aksi mereka (seperti Kyai Maimoen Zubair). Kyai Zubair yang dianggap sebagai ulama “khos” tentu tidak bisa dihadapi dengan gaya radikal seperti mengata-ngatainya atau bahkan menyerangnya secara fisik. Jika itu yang dipilih FNKSDA, bisa jadi warga NU justru berbalik memusuhi mereka dan akhirnya kontraproduktif dengan agenda mendorong transformasi di tubuh NU.

Strategi “menghadapi” Kyai Zubeir ala Fayyadl (koordinator umum FNKSDA) menjadi contoh menarik untuk dicermati secara kritis. Dalam artikelnya yang diposting di website FNKSDA (Daulat Hijau), Fayyadl mesti menggunakan sejumlah “kitab kuning” untuk mengkritisi argumen kyai Zubair dalam bahasa yang terkesan “santun”, sampai ia harus menyebut dirinya sebagai *al faqir* (yang fakir, miskin).<sup>45</sup> Bahkan di akhir pembahasan (kirik) sekalipun ia menyatakan bahwa walaupun ada kalangan santri yang mengikuti fatwa kyai Zubair yang mendukung pabrik semen maka ia hanya bisa berkata “*Anda dipersilakan untuk mengikuti “qaul” ini jika Anda yakin (setelah menyimak beberapa data*

*di atas)”*<sup>46</sup>. Dia hanya bisa berkata: “*atau lebih baik lagi, mengikuti “qaul qadim” beliau yang berpijak pada kemaslahatan jangka panjang dan sinergis dengan penolakan warga atas pabrik Semen”*<sup>47</sup>. Artinya kritik disini memang bercorak “lunak” jika dibandingkan dengan sikap revolusioner kalangan Marxisme pada umumnya. Disinilah terlihat bahwa adanya “sintesis” antara Marxisme dan tradisi pesantren tidak hanya mewarnai tradisi pesantren saja sehingga cenderung revolusioner, tetapi juga memberi warga bagi ide Marxisme itu sendiri. Kultur Aswaja yang berciri perngormatan pada kyai misalnya menjadi “rem” tersendiri bagi spirit revolusioner ala Marxian ketika diterapkan di lapangan. Kultur Aswaja juga menjadikan ide tentang politik identitas tidak bisa dilepaskan dari gerak langkah FNKSDA agar wacana yang diusungnya mendapatkan tempat di “hati” kalangan Nahdliyin.

## Kesimpulan

Sebuah kesimpulan yang dapat dipetik dari telaah FNKSDA ialah gerakan tersebut berupaya mengembangkan sebuah teologi Islam pro lingkungan yang khas dan juga menjadi pedoman gerak organisasi tersebut. Digerakkan oleh kekecewaan kaum muda Nahdliyin terhadap organisasi struktural mereka yang

<sup>45</sup>Muhammad Al Fayyadl. Menakwil Penyikapan Mbah Maimoen Atas Kasus Semen. “Menakwil Penyikapan Mbah Maimoen Atas Kasus Semen”. <https://daulathijau.wordpress.com/2017/01/11/menakwil-penyikapan-mbah-maimoen-atas-kasus-semen/> diakses tanggal 8 April 2019.

<sup>46</sup>Muhammad Al Fayyadl. Menakwil Penyikapan Mbah Maimoen Atas Kasus Semen. “Menakwil Penyikapan Mbah Maimoen Atas Kasus Semen”. <https://daulathijau.wordpress.com/2017/01/11/menakwil-penyikapan-mbah-maimoen-atas-kasus-semen/> diakses tanggal 8 April 2019.

<sup>47</sup>Muhammad Al Fayyadl. Menakwil Penyikapan Mbah Maimoen Atas Kasus Semen. “Menakwil Penyikapan Mbah Maimoen Atas Kasus Semen”. <https://daulathijau.wordpress.com/2017/01/11/menakwil-penyikapan-mbah-maimoen-atas-kasus-semen/> diakses tanggal 8 April 2019.

dianggap tidak berbuat banyak bagi kemaslahatan warga nahdliyin sendiri (basis kultural mereka) yang rata-rata berada di wilayah pedesaan terkhusus dalam upaya mencegah perusakan lingkungan yang terjadi di berbagai kantong-kantong warga Nahdliyin maka mereka memilih bangkit dan mendirikan FNKSDA.

Konteks yang khas tersebut yakni kekecewaan terhadap organisasi NU dan juga terhadap kekuatan kapitalisme yang dianggap sebagai biang keladi kerusakan lingkungan membuat formulasi teologi lingkungan yang mereka hasilkan begitu khas. Terkait perlawanan terhadap kapitalisme kaum muda nahdliyin ini, yang berposisi juga sebagai kalangan yang “terdidik secara Barat” akibat persentuhannya dengan dunia pergerakan ataupun kampus menganggap ide Marxisme sebagai senjata ampuh dalam melawan kapitalisme.

Akan tetapi Marxisme ini bagi kalangan FNKSDA haruslah “dibumikan” karena bagaimanapun juga tradisi Marxisme dengan bahasa-bahasa “melangitnya” tidak lekat di kalangan santri ataupun masyarakat Nahdliyin secara umum. Maka sebagai “ikhtiyar” untuk menggugah kesadaran di tubuh NU sendiri sekaligus sebagai prasyarat diterimanya wacana mereka maka sudah tidak suka ide Marxisme tersebut harus “dibumikan”, dengan mengambil “bahasa” pesantren dan kultur tradisional kalangan Nahdliyin sebagai ujung tombaknya.

Sehingga bisa dikatakan corak teologi lingkungan ala FNKSDA adalah revolusioner ala Marxian tetapi dikemas dalam bahasa fiqhiah atau tradisi kitab kuning ala NU maupun tradisi masyarakat Islam tradisional seperti tahlilan dan peringatan kematian. Sebuah pendekatan yang mengingatkan kita pada gerakan Islam

kiri di Indonesia di masa lalu yang juga berupaya memasukkan spirit revolusioner Marxisme ke dalam tradisi Islam di Indonesia.<sup>48</sup> Maka tidak heran ketika dalam berbagai aktivitas FNKSDA, kita dapat dengan mudah menemukan nuansa “sintesis” ini, seperti istilah “ngaji agraria” atau “pesantren agraria”.

Jika berkaca pada konsepsi Boudieau tentang kapital sosial maka kita akan menemukan relevansinya untuk membaca strategi berteologi lingkungan ala FNKSDA. Bourdieu sendiri menyatakan bahwa agama termasuk kapital sosial, sementara kapital sosial sendiri memiliki berciri khas pada komunalitas dan jaringan yang di dalamnya terdapat *power* yang kuat.<sup>49</sup> Bourdieu memang membicarakan agama dalam konteks realis bukan etis, dimana melalui institusi atau jaringan keagamaan tersebut seseorang atau kelompok – terlebih yang termarginalkan secara ekonomi- dapat “mendobrak” keadaan yang ada dengan menggunakan jaringan atau institusi keagamaan tersebut.

Kasus 212 misalnya adalah contoh nyata. Terlepas dari setuju atau tidak pada gerakan tersebut tetapi jelas bahwa ketika berhasil menggerakkan sentimen keagamaan masyarakat seseorang atau kelompok dapat memperoleh energi dukungan yang kuat hingga bahkan mampu menjungkalkan pihak yang berkuasa di

---

<sup>48</sup>M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2007) h. 279. Contoh paling nyata adalah masuknya paham Marxisme ke dalam Sarekat Islam –berpaham Islam modernis bukan tradisional ala NU- yang melahirkan sejumlah tokoh bercorak revolusioner di di dalamnya akibat pengaruh ide Marxisme.

<sup>49</sup>Chris Baker, *Social, Religious, and Spiritual Capitals: A Psychological Perspective*. Dalam Marian de Souza *et al* (ed). *International Handbook of Education for Spirituality, Care and Wellbeing* (New York: Springer, 2009) h.173.

Jakarta saat itu (Ahok) –yang notabene didukung pemerintah pusat-.<sup>50</sup>

Memang tidak dapat dipungkiri agama memiliki tempat yang kuat di sebagian besar masyarakat Indonesia, dan siapa saja yang dapat menggunakannya –dalam perspektif Bourdieu- maka potensi untuk berkuasa sangat terbuka lebar. Itulah yang sekiranya juga dilakukan FNKSDA, jika mereka berhasil menyebarluaskan teologi lingkungan revolusioner yang “membumi” tersebut di tengah masyarakat yang memiliki tradisi Nahdliyin maka diharapkan dapat mendorong sebuah gerakan yang sangat besar untuk menentang kuasa kapitalisme (ekonomi) yang dianggap sebagai musuh besar FNKSDA yang harus disingkirkan dari bumi Indonesia.

Akan tetapi belum lengkap jika tidak menempatkan FNKSDA dalam peta besar pengembangan *discourse* teologi lingkungan yang berbasis pada tradisi Islam di Indonesia.<sup>51</sup> Hal ini perlu untuk dilakukan untuk semakin mengetahui apa kekhasan teologi yang dikembangkan FNKSDA dari teologi lingkungan lain yang dikembangkan di Indonesia. Selain juga untuk mengetahui apakah eksistensi FNKSDA beserta teologinya memiliki kontribusi penting untuk melengkapi “kekurangan” dari berbagai teologi lingkungan yang sudah dikembangkan sebelumnya.

<sup>50</sup>Republika, “Aksi 212 Gerus Elektabilitas Ahok”. <https://www.republika.co.id/berita/koran/politik-koran/16/12/08/ohuww12-aksi-212-gerus-elektabilitas-ahok> diakses tanggal 7 April 2019.

<sup>51</sup>Nanang Indra Kurniawan, Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 16, No. 1, 2012, h. 7-14. Dalam konteks peta besar *discourse* tentang lingkungan –yang berbasis ide sekuler- telah coba dipetakan oleh Nanang Indra Kurniawan.

Salah satu komponen besar yang berkontribusi menyusun peta tersebut adalah organisasi Muhammadiyah dengan teologi lingkungan khas mereka. Teologi lingkungan ala Muhammadiyah dapat dikatakan bertolak belakang dengan teologi lingkungan yang diperjuangkan oleh FNKSDA. Perbedaan bukan terletak pada perlawanan pada kapitalisme karena Muhammadiyah sendiri justru berupaya melawan kapitalisme lewat jihad konstitusinya.<sup>52</sup> Perbedaan mendasar antara teologi lingkungan Muhammadiyah dan FNKSDA adalah pada persoalan tradisi, posisi ideologi “asing” dalam pembangunan teologi mereka, dan format perjuangan mereka. Dapat dikatakan perbedaan ini terletak pada tradisi keimuan dan *manhaj* yang berbeda antara Muhammadiyah dan NU. Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan teologi lingkungan FNKSDA berpijak pada ide “pembumian” Marxisme, yang terinspirasi pada strategi “pembumian” ide pluralisme yang telah jauh hari disuarakan Gus Dur. Teologi “pembumian” ala FNKSDA atau Gus Dur tersebut jelas memiliki perberbedaan dengan tradisi Muhammadiyah yang lebih puritan.<sup>53</sup> Muhammadiyah sendiri

<sup>52</sup>Muhammad Al Fayyadl “Memahami Progresifnya Muhammadiyah”. <http://islambergerak.com/2015/06/memahami-progresifnya-muhammadiyah/> diakses tanggal 4 April 2019.

Perang Muhammadiyah melawan kapitalisme ini juga diafirmasi oleh aktivis FNKSDA Al Fayyadl, walau dirinya masih merasa langkah Muhammadiyah masih “kurang mendasar” dalam perjuangannya tersebut.

<sup>53</sup>Abdul Munir Mulkan, *Kiai Ahmad Dahlan: Jejak Pembaruan Sosial Dan Kemanusiaan* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 66. Puritan bermakna cenderung pada skriptualisme, kembali pada sumber asli ajaran agamanya. Dalam konteks Muhammadiyah kembali pada Quran dan Hadits. Karena cenderung puritan maka Muhammadiyah berupaya untuk mengikis segala

memiliki manhaj Tadjid –atau kini lebih dipopulerkan dengan istilah Islam berkemajuan-.<sup>54</sup>

Tajdid memang bisa dimaknai dua hal yakni pembaharuan dalam hal keagamaan (yang makananya perbaharuan menuju ke akar, kembali ke sumber, purifikasi, menuju Quran dan sunnah) dan pembaharuan dalam hal duniawi (dinamisasi).<sup>55</sup>Dimana dalam hal duniawi berbagai kemajuan yang sekiranya dapat bermanfaat bagi kemajian kehidupan masyarakat maka justru didorong untuk diserap dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>56</sup> Sehingga berbeda dengan FNKSDA yang harus “meminjam” bahasa pesantren dan tradisi masyarakat sebagai cara untuk “mengkomunikasikan” spirit Marxisme yang memiliki “bahasa” yang berbeda dengan tradisi masyarakat dan pesantren tersebut. Dalam konteks Muhammadiyah sejak lama sudah dikenal upaya integrasi kemodernan dan Islam (dengan kata lain pemakaian “dwibahasa” sudah dikenal sejak awal Muhammadiyah berdiri karena pengaruh paham tajdid). Maka sejak era Dahlan misalnya penggunaan tradisi Barat dalam mengajar seperti menggunakan bangku kursi dan tradisi mengajar klasikal misalnya dan bukan lagi tradisi sorogan ala tradisional sudah terjadi (tajdid dalam arti dinamisasi) tetapi materi ajarnya tetap berlandaskan Quran dan Sunnah

(tajdid dalam arti purifikasi).<sup>57</sup> Dengan kata lain dua bahasa (Islam dan modern) sudah menjadi tradisi tersendiri di dalam tradisi Muhammadiyah. Sehingga tidak heran ketika dalam karya-karya bertema lingkungan yang dipublikasikan Muhammadiyah seperti Fikih Air di satu sisi bersisi dalil Quran dan Sunnah tetapi di sisi lain “penuh” dengan kritik kapitalisme dengan bahasa ala kampus modern dalam buku tersebut.<sup>58</sup>

Lebih jauh tradisi tajdid tersebut menjadikan corak khas teologi pro lingkungan yang digagas oleh Muhammadiyah. Karena pengaruh tajdid (purifikasi) maka corak teologi lingkungan Muhammadiyah lebih dibangun dari kajian berbasis Quran dan Sunnah, bukan dengan kajian kitab kuning ala Pesantren NU ataupun meminjam kerangka Marxisme. Disisi lain karena pengaruh tajdid (dinamisasi), maka relatif mudah pula masuk berbagai ide modern dalam bangunan teologi lingkungan Muhammadiyah. Tetapi perlu ditegaskan bahwa posisi ide modern tersebut lebih sebagai entitas terpisah, yang keberadaannya diposisikan sebagai ide yang memiliki paralelitas tersendiri dengan ide pro lingkungan yang sudah berupaya digali dari Quran dan sunnah oleh kalangan Muhammadiyah. Sehingga dapat dikatakan teologi pro lingkungan Muhammadiyah lebih bernuansa integrasi agama dan sains (atau tradisi

---

bentuk sinkretisme yang dianggap bertentangan dengan Quran dan Hadits.

<sup>54</sup>Zuly Qodir, *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan Dan Pemikiran Abad Kedua* (Yogyakarta: Kanisius, 2010) h.46.

<sup>55</sup>Majelis Dilibang dan LPI PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*. (Jakarta: Kompas, 2010), h.352.

<sup>56</sup>Majelis Dilibang dan LPI PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*. (Jakarta: Kompas, 2010), h.352.

---

<sup>57</sup>Ma'mun Murod Al-Barbasy. “Ahmad Dahlan, Muhadjir Effendy, dan Pembaruan Pendidikan”.

<http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/08/16/ahmad-dahlan-muhadjir-effendy-dan-pembaruan-pendidikan/> diakses tanggal 5 April 2019.

<sup>58</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. “Wujud Kepedulian Muhammadiyah Terhadap Lingkungan Hidup”. <https://tarjih.or.id/terbitkan-buku-fikih-air-bentuk-perhatian-muhammadiyah-terhadap-lingkungan-hidup/> diakses tanggal 5 April 2019.

lain) daripada bercorak “fusi” Islam dan tradisi lain (seperti Marxisme). Jika “fusi” maknanya tradisi lain (seperti Marxisme) melebur dengan tradisi pesantren bahkan potensial bertakhta sebagai paradigma dalam pembacaan kitab kuning atau memberi warna baru dalam tradisi masyarakat semacam tahlilan misalnya, dalam Muhammadiyah tidak ditemukan adanya “fusi” (peleburan) tetapi lebih kepada strategi integrasi (tidak dalam arti lebur tapi lebih pada penyatuan dwibahasa layaknya kamus yang memuat kosakata Indonesia-Inggris).

Pengaruh tajdid ini juga berimplikasi pada perjuangan/aktivisme lingkungan Muhammadiyah yang berbeda dengan FNKSDA. Jika aktivis FNKSDA seperti Fayyadl misalnya mempertanyakan mengapa cara yang ditempuh Muhammadiyah menggunakan pendekatan legal-formal (dengan istilah jihad konstitusi) dan bukan gerakan ekstra parlemen yang menurutnya lebih mendasar<sup>59</sup>, maka sejatinya sangat terkait ruh tajdid tersebut. *Pertama*, spirit tajdid dalam arti purifikasi tercemin dari upaya jihad konstitusi yang berupaya “membersihkan” undang-undang dari “noda” kapitalisme, dan mengembalikannya ke asal, ke sumber, yakni Pancasila yang berorientasi pada ide kerakyatan. *Kedua*, spirit tajdid dalam arti dinamisasi tercemin dari upaya jihad konstitusi itu sendiri yang berupaya menempuh jalur modern untuk melakukan perubahan (percaya pada keberhasilan *engineering*

masyarakat lewat skema birokrasi). *Ketiga*, spirit tajdid juga tercemin dari cara khas Muhammadiyah dalam menyebarkan teologi pro lingkungan mereka. Misal dengan cara mencetak buku atau mengadakan seminar (cara modern).<sup>60</sup> Berbeda dengan FNKSDA yang menggunakan cara kultural seperti pengajian dan tahlilan misalnya. Berbeda pula dengan spirit radikal FNKSDA yang karena terpengaruhi oleh marxisme tidak menganggap perjuangan mentransformasikan sistem yang ada sebagai solusi fundamental dari masalah lingkungan. Bagi Marxisme bukan lewat sistem tetapi menghancurkan sistem (revolusioner) itulah yang dianggap lebih masuk akal.<sup>61</sup>

Sebagai penutup perlu untuk digaribawahi apakah dengan adanya perbedaan antara teologi lingkungan ala FNKSDA dengan Muhammadiyah misalnya berarti mengindikasikan sebuah peta besar *discourse* teologi Islam pro lingkungan yang bercorak konfliktual, saling menegasikan satu dengan yang lainnya? Dalam tulisan ini justru ingin ditegaskan hal sebaliknya, khususnya jika ditinjau dari perspektif fungsional dalam upaya melawan

<sup>60</sup>Royhes. “MLH Muhammadiyah Lampung, Gelar Penyuluhan Peduli Lingkungan Hidup”. <https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/mlh-muhammadiyah-lampung-gelar-penyuluhan-peduli-lingkungan-hidup/> diakses tanggal 6 April 2019.

;Suara Muhammadiyah, “PP Muhammadiyah Terbitkan Buku Fiqh Air”. <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/03/04/p-p-muhammadiyah-terbitkan-buku-fiqh-air/> diakses tanggal 7 April 2019.

<sup>61</sup>Mengikuti falsafah Marxisme ortodoks yang memadam hanya dengan revolusi proletariat yang akan merubah keadaan bukan dengan cara “moderat” ala kaum revisionis semacam Bernstein. Hal Draper & Ernest Haberkern, *Karl Marx's Theory of Revolution* (New York: Monthly Review Press & Center for Socialist History, 2005) h.236.

<sup>59</sup>Muhammad Al Fayyadl “Memahami Progresifnya Muhammadiyah”. <http://islambergerak.com/2015/06/memahami-progresifnya-muhammadiyah/> diakses tanggal 4 April 2019. Perang Muhammadiyah melawan kapitalisme ini juga diafirmasi oleh aktivis FNKSDA Al Fayyadl, walau dirinya masih merasa langkah Muhammadiyah masih “kurang mendasar” dalam perjuangannya tersebut.

kapitalisme yang dianggap sebagai biang keladi kerusakan lingkungan dan kesengsaraan masyarakat. Kedua teologi lingkungan tersebut satu visi yakni menentang kapitalisme, akan tetapi karena pengaruh tradisi Islam yang berlainan menjadikan corak teologi tersebut juga berbeda. Akan tetapi jika diperhatikan dengan seksama kedua kelompok tersebut potensial “melengkapi” satu sama lainnya. Kalangan FNKSDA sebenarnya menysasar warga desa dan institusi NU yang dianggap tidak peka dengan penderitaan warganya. Walau perlu ditegaskan pula FNKSDA yang sudah bersentuhan dengan pemikiran modern juga fasih untuk berdialog dan menysasar kalangan msayarakat modern yang sekular.

Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa FNKSDA memiliki kelemahan untuk menysasar kalangan Muslim yang cenderung puritan ataupun kalangan masyarakat kota secara umum karena spirit revolusioner ala FNKSDA yang besar. Begitu pula Muhammadiyah yang cenderung puritan dan modern juga tidak bisa berbuat banyak untuk menjangkau kaum santri ataupun kalangan masyarakat desa yang lebih bercorak tradisional. Kelamahan masing-masing pihak inilah yang sejatinya justru menjadi perhatian kedua kalangan, termasuk FNKSDA untuk lebih memposisikan dirinya dalam peta besar pengembangan *discourse* teologi pro lingkungan ini. Harapannya dengan memahami posisi dirinya sekaligus memahami kelebihan dan kekurangan dari gerakannya maka pada titik ini bisa dirintis kerjasama yang lebih strategis diantara berbagai gerakan tersebut –ingat Muhammadiyah juga bukan satu-satunya pengisi peta besar tersebut– sehingga ke depannya spirit pro lingkungan ini dapat semakin

menyebarkan di kalangan masyarakat Indonesia yang notabene mayoritasnya beragama Islam.

Perlu ditambahkan juga membangun kerjasama bukan berarti menegasikan adanya kritik. Kritik Fayyadl pada cara jihad lingkungan Muhammadiyah yang cenderung legal formal misalnya bisa menjadi masukan besar bagi kalangan Muhammadiyah misalnya untuk mengembangkan strategi yang lebih tajam lagi untuk penyelamatan lingkungan tanpa menghapus corak teologi lingkungan bercorak tajdid mereka. Begitu pula misalnya ada kritik yang dilancarkan pada FNKSDA tentunya harus dimaknai sebagai suatu yang positif pula bagi pengembangan aktivismenya di kemudian hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Galba, Sindu, dan kawan-kawan, *Sejarah Daerah Kabupaten Karimun*, Diparsenbud Kab. Karimun & BKSNT Tanjung Pinang, 2001
- Laporan Data Kantor Urusan Agama, Kecamatan Buru, Kementerian Agama Kabupaten Karimun, Maret 2016
- Laporan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya se-Kabupaten Karimun, Tahun 2014
- Syahri, Aswandi dan Irwanto, *Khazanah Masjid Bersejarah Bumi Berazam*, DPD BKPRMI Kabupaten Karimun, 2015
- Sugiharta, Sri, *Masjid-Masjid Kuno di Sumatra Barat, Riau, dan Kepulauan Riau*, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar, 2006
- Swastiwi, Anastasia Wiwik, *Peninggalan Sejarah dan Obyek Wisata di*

*Kabupaten Karimun, Majalah  
Marwah, vol 3, No. 5, Th . 2007*

Tugiyono KS, dkk, *Peninggalan Situs dan  
Bangunan Bercorak Islam di  
Indonesia*, PT. Mutiara Sumber  
Widya, 2006

**Informan**

1. Suroto (Kasi Sejarah Adat dan Kepercayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun)
2. Anasril (Staf Kementeria Agama Kabupaten Karimun)
3. Tati Mesnoriawaty (Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Kabupaten Karimun)
4. Daeng Muhammad (Kepala DKM Masjid Besar Raja Haji Abdul Ghani, Pulau Buru, Kabupaten Karimun)
5. Abdul Kadir (Ketua RW Kampung Busung dan Pengurus DKM Masjid Besar Raja Haji Abdul Ghani, Pulau Buru, Kabupaten Karimun)
6. Faizal (Warga Kampung Busung, Pulau Buru, Karimun)
7. Ilyas Masduki (Kepala SMPN Buru, Karimun)